

ABSTRAK

Adanya otonomi daerah semakin membuka kesempatan bagi para stakeholders untuk menguasai sumber daya alam yang ada di dalam hutan lindung. Salah satunya dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan. Kerumitan dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan timbul karena adanya otonomi daerah yang menciptakan tarik menarik kepentingan antar lembaga pemerintahan. Hal ini semakin kompleks ketika hadirnya stakeholders lain yang berasal dari kelompok pengusaha dan kelompok masyarakat Kota Tarakan.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, yaitu apa saja kepentingan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan dan bagaimana interaksi *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan di era otonomi daerah. Ini merupakan penelitian yang sederhana dengan ruang lingkup yang sangat kecil sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai penelitian tambahan untuk melengkapi penelitian-penelitian besar yang telah dilakukan sebelumnya.

Teori yang digunakan adalah *theory contentious politics* atau teori politik perseteruan yang dikemukakan oleh McAdam, Tarrow, dan Tilly. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian maka dilakukan wawancara, observasi dan juga bantuan dari data-data sekunder yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan jika kasus yang berhubungan dengan tanah di Kota Tarakan merupakan hal yang sensitif. Kita dapat menemukan adanya perbedaan kepentingan yang dibawa oleh para *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah gesekan kepentingan yang menghasilkan permasalahan di dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan. Perseteruan politik yang terjadi menciptakan ketidakselarasan antar *stakeholders* sehingga memicu konflik dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan.

Kata Kunci: *Teori Politik Perseteruan, Stakeholders, Pengelolaan Hutan Lindung*

ABSTRACT

Because of the presence of Regional autonomy, it increasingly opens an opportunity for the stakeholders to control natural resources in the protected forest. One of them is in the Protection Forest Management in Tarakan Island. Complexity in Protection Forest Management in Tarakan Island arises because of the attraction of regional autonomy that creates conflicts of interest among the government agencies. It becomes more complex when the other stakeholders from employers' groups and community groups step in this problem.

There are two main points in this study, which are what the concerns of the stakeholders involved in the Protection Forest Management in Tarakan Island and how the interaction of stakeholders in Protection Forest Management in Tarakan Island in the era of regional autonomy. This is a simple study with a very small scope that can be a additional information study to support the major studies that have been done before.

The theory that is used in this study is Contentious Politics Theory or Political Feud by McAdam, Tarrow, and Tilly. This study took a type of qualitative research and descriptive approach. For obtaining the relevancy of the data, the study was conducted by interview, observation and also assistance from the secondary data obtained. The result of the study shows that the problem which relates to the land in the town of Tarakan is sensitive. We can find the different concerns that are taken by the stakeholders which ultimately lead to a friction problem in Protection Forest Management in Tarakan Island. The political feud create disharmony among stakeholders so that it can be leading to conflict in Protection Forest Management in Tarakan Island.

Keywords : *Contentious Politics Theory, Stakeholders, Management of protection forest*